

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN  
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP  
ALOKASI BELANJA MODAL**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Jurusan Akuntansi



oleh :

**YOGI FERDIWAN**

**NIM : 2012310625**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS**

**SURABAYA**

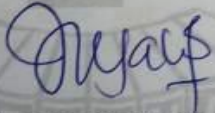
**2017**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Yogi Ferdiawan  
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 05 September 1993  
N.I.M : 2012310625  
Program Studi : Akuntansi  
Program Pendidikan : Sarjana  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal

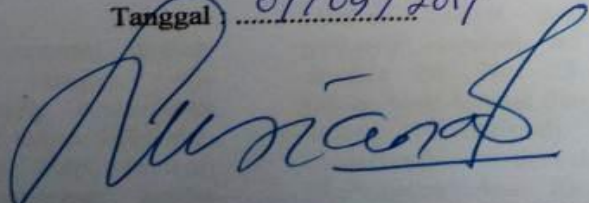
**Disetujui Dan Diterima Baik Oleh :**

Dosen Pembimbing,  
Tanggal : 07/09/2017

  
( Diyah Pujiati S.E.,M.Si )

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal : 07/09/2017

  
( Dr. Luciana Spica Almillia S.E.,M.Si.,OIA.,CPSAK )

**THE EFFECT OF REGIONAL TAX, REGIONAL RETRIBUTION  
AND SPECIAL ALLOCATION FUNDS (DAK) AGAINST  
ALLOCATION OF CAPITAL EXPENDITURE**

**YOGI FERDIWAN**

**2012310625**

[yogiferdian23@gmail.com](mailto:yogiferdian23@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to determine whether the Regional Tax, Regional Retribution and Special Allocation Fund affect the allocation of Capital Expenditure in the City/ District of East Java. The population and sample of this study were 36 City/District in East Java. The type of this research is using quantitative method that focuses on hypothesis testing, the data analyzed, its measured and the resulting conclusion is generalization. Data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS). Methods of data collection conducted by documentation method from secondary data source by collecting, recording, and processing data related to research for 3 years, that is year 2014-2016. Data analysis used in this research is multiple linear regression with SPSS application tools (Statistical Product and Service Solutions). The results of this study prove that local taxes and special allocation funds influence the allocation of capital expenditure in the government City/Regency in the province of East Java. While the regional retribution variable does not affect the allocation of capital expenditure in the government of the City/Regency in the province of East Java.*

*Keywords: Local Taxes, Regional Levies, Special Allocation Funds, Capital Expenditures, Realized Budget Reports.*

**PENDAHULUAN**

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan di berlakukannya tentang Pemerintah Daerah. UU No. 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah dalam perkembangannya pertama regulasi ini diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun 2014 babak baru terkait dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah (Kabupaten dan Kota) diberikan kewenangan yang lebih luas dalam

mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi secara baik dan menjalankan kedisiplinan anggaran. Pengalokasian dana investasi merupakan suatu aktifitas pendanaan, dimana pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyusunan anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu. Anggaran dalam pemerintah daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Kawedar dkk, 2008).

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu data yang akan diteliti adalah laporan realisasi APBD tahun 2014 hingga 2016 dari Kabupaten/Kota di Jawa

Timur. Pemilihan periode waktu tersebut dengan menggunakan data 3 tahun terakhir dari penyusunan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk kondisi belanja modal di daerah Kabupaten/kota di Jawa Timur. Penelitian ini juga dimotivasi masih adanya perbedaan hasil penelitian (*research gap*) diantara penelitian-penelitian sebelumnya yang melihat pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi diatas maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut dan memfokuskan pada pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal saat ini. Dengan lebih memperinci variabel PAD menjadi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperinci dana transfer menjadi dana alokasi khusus, yang disertai dengan penggunaan data terbaru. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR** ”

### **RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS Pajak Daerah**

Menurut Diana Sari (2013;34) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh wajib membayarnya menurut undang-undang dengan tidak mendapat prestasi untuk membiayai

pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dalam keuangan pemerintah, pendapatan yang bersumber dari penerimaan perpajakan akan digunakan untuk mendanai belanja pemerintah termasuk didalamnya belanja modal. Sesuai dengan karakternya, belanja modal dalam keuangan pemerintah diterjemahkan sebagai belanja yang dilakukan dalam rangka pemupukan modal dalam aset fisik, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya (Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI, 2015).

#### **Retribusi Daerah**

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penganggaran pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam pemungutan retribusi, pemerintah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak

dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu (UU No. 28 Tahun 2009). Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

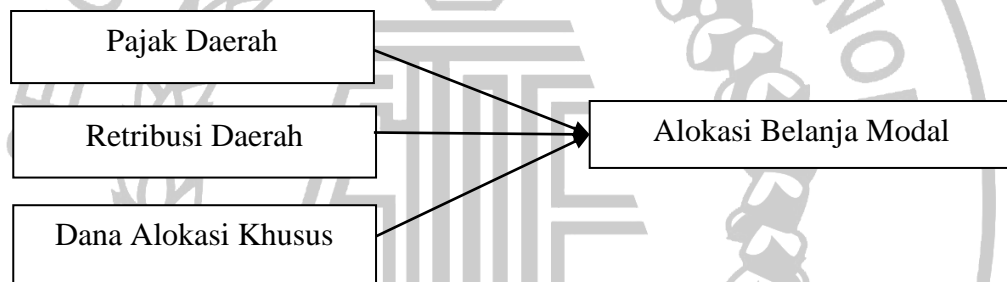
Penetapan jumlah dana alokasi khusus (DAK) dan alokasinya kepada daerah merupakan hasil keputusan antara panitia anggaran DPR dengan Pemerintah yang terdiri dari unsur Depkeu, Depdagri, Bappenas, dan departemen teknis yang bidang tugasnya menerima alokasi DAK. Meskipun mekanisme penetapan DAK melibatkan beberapa lembaga, keputusan akhir mengenai total jumlah dana alokasi khusus (DAK) dan alokasinya menjadi wewenang Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR. DAK untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana

perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

### **Belanja Modal**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Berdasarkan beberapa pengertian belanja modal diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan belanja **Kerangka Pemikiran**

modal adalah pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk kelancaran pembangunan di daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan daerah serta selanjutnya akan menambah belanja operasional dan pemeliharaan. Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.



**Gambar 1**

- H1: Pajak daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
- H2: Retribusi daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
- H3: Dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

### **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan tentang penelitian ini yaitu mengetahui tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal. Dalam penelitian ini data yang digunakan jenis data sekunder sebagai sumber data yang ada. Jenis penelitian yang dilakukan adalah berdasarkan karakteristik

### **Kerangka Pemikiran**

permasalahan, peneliti ini digolongkan dalam penelitian kausal komparatif. Penelitian ini menunjukkan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Peneliti mengidentifikasi fakta peristiwa sebagai variabel-variabel yang dipengaruhi, yaitu variabel dependen.

### **BATASAN PENELITIAN**

Penelitian tersebut dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagai lokasi penelitian, dengan melihat data realisasi anggaran belanja daerah (APBD) di tahun 2014 dan 2016. Pemilihan profinsi Jawa Timur dikarenakan

Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki mobilitas tinggi dalam hal belanja modal dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Dengan tujuan untuk memperoleh data yang layak untuk diuji.

### Identifikasi Variabel

Variabel terikat (Y)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel dependen adalah Belanja Modal.

Variabel bebas (X)

Variabel bebas (variabel independen), yaitu :

$X_1$  = Pajak Daerah

$X_2$  = Retribusi Daerah

$X_3$  = Dana Alokasi Khusus

### Populasi, Sampel dan Teknik

#### Pengambilan Sampel

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki dari populasi tersebut (Sugiyono, 2013).

Sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang melaporkan data keuangan daerahnya ke situs dirjen perimbangan keuangan daerah dan Badan Pusat Statistik Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *sampling* jenuh (*sampling* sensus). *Sampling* Jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012:96).

### Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui media perantara atau pihak lain. Metode pengambilan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada kemudian dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### Teknik Analisis Data

#### Analisis Data Deskriptif

Analisis deskriptif yaitu analisis yang menggambarkan/menceritakan hasil penelitian di lapangan terutama yang berkaitan dengan responden penelitian. Analisis ini berguna untuk menggambarkan objek penelitian dan menggambarkan responden penelitian yang diteliti. Analisis deskriptif ini menjelaskan mengenai distribusi dari masing-masing variabel, yaitu : variabel bebas atau independen yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus, serta variabel terikat atau dependen yaitu belanja modal.

### Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi persyaratan lolos dari asumsi klasik. Uji klasik ini terdiri dari uji

normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas, data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung autokorelasi. Untuk itu, sebelum melaksanakan pengujian terhadap regresi linear berganda perlu dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier yaitu studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan variabel

#### Uji Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel

#### Uji T (Uji Parsial)

Uji t berguna untuk menguji masing-masing variabel bebas atau

independen bertujuan untuk memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.

### Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti maka akan dilakukan analisis regresi linear berganda yang meliputi uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>), uji pengaruh simultan (uji statistik F), dan uji parsial (uji statistik t).

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen (Imam Ghazali, 2011: 97).

independen secara parsial (individu) memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Subyek

Tabel 4.1  
Karakteristik Pemilihan Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah kabupaten/kota	Periode	Jumlah
Jumlah kabupaten/kota di provinsi jawa timur	38	3	114
Kabupaten dan kota yang tidak melaporkan APBD 2014-2016	2	3	(6)
Jumlah data selama 3 tahun yang bisa disajikan sampel	36	3	108



Berdasarkan tabel 4.1 Setelah terkumpul sebanyak 38 kabupaten dan kota diprovinsi Jawa Timur kemudian data tersebut di eliminasi sesuai dengan kriteria yang ada di dalam penelitian. Pada proses eliminasi dari 38 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur yang tidak melaporkan datanya ditahun 2016 ada 2 kota. Sehingga sampel akhir

yang memenuhi kriteria penelitian berjumlah 36 sampel. Periode penelitian ini yaitu selama tiga tahun yaitu dari tahun 2014-2016, maka jumlah data secara keseluruhan 36 kabupaten dan kota dikalikan 3 periode adalah 108 sampel. Berikut ini adalah nama-nama 36 Kabupaten/Kota yang dapat digunakan sebagai sampel penelitian.

### Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.2  
UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics					
Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. deviation
BM_Y	108	84.416.670	2.059.459.145	418.036.350,5	316.875.559,2
PD_X1	108	14.513.054	2.817.640.000	163.319.801,6	446.665.766,5
RD_X2	108	5.209.867	537.319.754	39.442.340,3	70.107.226,4
DAK_X3	108	22.559.490	693.917.527	142.873.296,6	141.236.990,8

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan statistik deskriptif secara keseluruhan untuk variabel dependen belanja modal dan variabel independen pajak daerah, retribusi daerah dan dana aloaksi khusus (DAK). Dari Tabel tersebut dapat terlihat rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi untuk tiap variabel independen. Nilai rata-rata pajak, retribusi lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi, artinya variasi data untuk variabel pajak, retribusi lebih heterogen. Nilai rata-rata belanja modal dan dana alokasi khusus lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasinya, artinya variasi data untuk variabel

belanja modal dan dana alokasi khusus bersifat homogen.

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui Nilai Belanja Modal untuk di tahun 2014-2016, nilai belanja modal terkecil (*minimum*) adalah Rp 84.416.670 dimiliki oleh kota Mojokerto dikarenakan pada Kota Mojokerto luas wilayahnya lebih kecil dan untuk pembangunan pelayanan sarana dan prasarana layanan publik hanya sedikit, sedangkan terbesar (*maximum*) adalah Rp. 2.059.459.145 dimiliki oleh kota Surabaya, dapat dilihat bahwa Kota Surabaya juga sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur sehingga fasilitas pelayanan dan sarana dan prasarana dapat dioptimalkan dan dapat menunjang

kegiatan ekonomi sehingga pengeluaran belanja modal sangat besar. Rata-rata (*mean*) nilai Belanja Modal di tahun 2014-2016 adalah Rp. 418.036.350. Standar deviasi Belanja Modal di tahun 2014-2016 adalah Rp. 316.875.559 yang berarti lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Dapat dikatakan bahwa rentang data kecil dan data bersifat homogen karena sedikitnya variasi data atau dengan kata lainnya belanja modal menunjukkan nilai yang baik.

Diketahui pajak daerah pada tahun 2014-2016 mempunyai nilai rata-rata 163.319.801,6, Sedangkan nilai standart deviasi data pajak daerah 446.665.766,5 yang berarti lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata. Dapat dikatakan bahwa rentang data besar dan data bersifat heterogen, karena banyak variasi data. jumlah Pajak daerah yang terkecil selama tiga tahun terakhir di provinsi Jawa Timur adalah kabupaten Sumenep dengan jumlah Rp. 14.513.054 sedangkan nilai pajak daerah yang terbesar atau maximum dimiliki kota Surabaya dengan jumlah Rp. 2.817.640.000, karena pada Kota Surabaya juga sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur dan juga memiliki nilai pajak daerah yang cukup tinggi dan mampu memberikan kontribusi pemasukan bagi pemerintahan.

Diketahui retribusi daerah pada tahun 2014-2016 mempunyai nilai rata-rata 139.442.340,3, Sedangkan nilai standart deviasi data retribusi

daerah 70.107.226,4 yang berarti lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata. Dapat dikatakan bahwa rentang data besar dan data bersifat heterogen, karena banyak variasi data. Jumlah reribusi daerahnya yang terkecil selama tiga tahun terakhir di provinsi Jawa Timur adalah Kota Batu yaitu dengan jumlah Rp. 5.209.867 sedangkan nilai retribusi daerah yang terbesar (*maximum*) adalah Kota Surabaya yaitu sebesar Rp. 537.319.754,, karena pada Kota Surabaya juga sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur dan juga memiliki nilai pajak daerah yang cukup tinggi dan mampu memberikan kontribusi pemasukan bagi pemerintahan.

Diketahui bahwa dana alokasi khusus pada tahun 2014-2016 mempunyai nilai rata-rata 142.873.296,6, Sedangkan nilai standart deviasi 141.236.990,8 yang berarti lebih tinggi dibandingkan dengan nilai standart deviasi. Dapat dikatakan bahwa rentang data besar dan data bersifat homogen, karena banyak variasi data. Jumlah dana alokasi khusus minimum 22.559.490 dimiliki oleh Kabupaten Sumenep di tahun 2015, sedangkan yang tertinggi menerima dana alokasi khusus dengan jumlah sebesar 693.917.527 dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo di tahun 2016, karena banyak sektor-sektor yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sidoarjo yang membutuhkan dana alokasi khusus untuk membiayai setiap kegiatannya.

## Uji Normalitas

Tabel 4.3  
UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
N	108
Kolmogorov-Smirnov Z	1,091
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,185

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) pada tabel 4.4 menunjukkan nilai 1,091 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,185. Karena hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan signifikansi diatas 0,05

(sebesar 0,185) maka hal tersebut menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Hasil uji ini memperkuat hasil uji normalitas dengan grafik distribusi dimana keduanya menunjukkan hasil bahwa data terdistribusi secara normal.

## Uji Multikolinearitas

TABEL 4.4  
UJI MULTIKOLINEARITAS

		<b>Collinearity</b>	<b>Statistics</b>
	Model	<i>Tolerance</i>	VIF
<b>Pajak Daerah</b>		0,117	8,535
<b>Retribusi Daerah</b>		0,117	8,534
<b>Dana Alokasi Khusus</b>		1,000	1,000

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas pada tabel 4.5, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* pajak sebesar 0,117, retribusi 0,117, dan dana alokasi khusus (DAK) 1,000, Ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* diatas 0,1 yang berarti bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Hasil yang sama juga dilihat dari nilai VIF

ketiga variabel independen yang menunjukkan angka dibawah 10 yang pertama adalah pajak daerah memiliki nilai VIF 8,535, selanjutnya retribusi daerah memiliki nilai VIF 8,534 dan yang terakhir adalah dana alokasi khusus (DAK) memiliki nilai VIF 1,000. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikolonieritas antar variabel.

## Uji Autokorelasi

**Tabel 4.6**  
UJI AUTOKORELASI

Model	Durbin-Watson
1	1,760

Dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson adalah sebesar 1,760. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan tingkat signifikansi 5%, jumlah sampel 108 dan jumlah variabel independen 3 ( $k=3$ ). Maka dari tabel Durbin Watson didapatkan nilai batas bawah (dl) sebesar 1.629 dan nilai batas atas

(du) sebesar 1,743. Berdasarkan dari data tersebut, dapat diketahui bahwa nilai DW 1,760 lebih besar dari nilai batas atas (du) 1,743 dan kurang dari  $4 - 1,743$  ( $4-du$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima atau dengan kata lain tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif

## Uji Heteroskedastisitas

**TABEL 4.7**  
HASIL UJI GLETSER

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	88406388,676	16145949,256		5,475	,000
PD_X1	,006	,066	,025	,087	,931
RD_X2	,060	,422	,040	,141	,888
DAK_X3	,051	,072	,070	,713	,477

Untuk masing-masing variabel independen memiliki nilai signifikan yaitu pajak daerah sebesar 0,931, retribusi daerah sebesar 0,888 dan dana alokasi khusus sebesar 0,477. Dimana tidak ada variabel

independen yang memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa di dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Pengujian Hipotesis

### Uji Ststistik F

**Tabel 4.8**  
HASIL UJI STATISTIK F

Model	F	Sig.
<b>1 regression</b>	<b>133,764</b>	<b>0,000<sup>b</sup></b>

Berdasarkan hasil dari tabel 4.8 tersebut menunjukkan hasil uji

ANOVA atau *F test* diatas, di dapat nilai F sebesar 133,764 dengan tingkat probabilitas (signifikan)

sebesar 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dibawah tingkat signifikansi 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan

bahwa salah satu variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, model regresi fit.

### Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
1	<b>0,794</b>	<b>0,788</b>

Berdasarkan dengan tabel 4.9 dapat dilihat nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,788. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa variasi alokasi belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan dana

alokasi khusus sebesar 78,8 persen, sedangkan sisanya 0,212 atau 21,2 persen (1 - 0,788) dapat dipengaruhi variabel lain diluar model. Kemudian nilai *Std. Error of the Estimate* sebesar 145.817.263,9.

### Uji Parsial Atau T

**Tabel 8**  
**UJI PARSIAL ATAU T**

Model	T	Sig.
Constant	<b>11,713</b>	<b>,000</b>
PD_X1	<b>6,758</b>	<b>,000</b>
RD_X2	<b>-,011</b>	<b>,991</b>
DAK_X3	<b>3,744</b>	<b>,000</b>

#### 1. Hasil Uji Hipotesis Pertama (H1)

Pada hipotesis pertama yang dibuat oleh peneliti adalah pajak daerah. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa t-hitung pajak daerah memperoleh hasil sebesar 6,758 dengan signifikansi sebesar 0,000. Diketahui bahwa nilai signifikan kurang dari 0.05 (0,000 < 0,005), sehingga Ho ditolak. Maka

dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Semakin besar pendapatan pajak daerah dalam suatu daerah maka alokasi belanja modal yang di lakukan akan semakin meningkat.

#### 2. Hasil Uji Hipotesis Yang Kedua (H2)

Pada hipotesis kedua yang dibuat oleh peneliti adalah retribusi daerah. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa t-hitung

retribusi daerah memperoleh hasil sebesar -,011 dengan signifikansi sebesar 0,991. Diketahui bahwa nilai signifikan lebih dari 0.05 ( $0,991 > 0,005$ ), sehingga  $H_0$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

### 3. Hasil Uji Hipotesis Yang Ketiga ( $H_3$ )

Pada hipotesis ketiga yang dibuat oleh peneliti adalah dana alokasi khusus (DAK). Pada tabel diatas menunjukkan bahwa t-hitung dana

### Uji Regresi Linier Berganda

alokasi khusus memperoleh hasil sebesar 3,744 dengan signifikansi sebesar 0,000. Diketahui bahwa nilai signifikan kurang dari 0.05 ( $0,000 < 0,005$ ), sehingga  $H_0$  ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Semakin besar pemberian dana dari pemerintah khususnya dana alokasi khusus dalam suatu daerah maka alokasi belanja modal yang dilakukan akan semakin meningkat.

Tabel 4.17  
UJI REGRESI LINEAR BERGAN DA

Model	Unstandardized coefficients	Sig
	B	
Constant	263127422,9	,000
Pajak daerah	,623	,000
Retribusi daerah	-,006	,991
Dana alokasi khusus	,374	,000

Dari tabel diatas diketahui nilai constant sebesar 263.127.422,9 sedangkan nilai signifikansi pajak daerah ( $X_1$ ) sebesar 0,623. Retribusi daerah ( $X_2$ ) sebesar -,011. DAK ( $X_3$ ) sebesar 0,374. Dari nilai tersebut dapat disusun regresi linier berganda sebagai berikut ini :

$$\text{Alokasi belanja Modal} = 263.127.422,9 + 0,623PD\_X1 + 0,374DAK\_X3$$

Persamaan regresi linier berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1 Konstanta (nilai milik Y) sebesar 263.127.422,9 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka alokasi

Belanja Modal setiap daerah sebesar 263.127.422,9 (dalam ribuan rupiah).

- 2 Koefisien regresi pajak daerah sebesar 0,623 menyatakan bahwa setiap ada kenaikan pajak daerah sebesar Rp. 1.000 maka akan meningkatkan pengalokasian Belanja Modal sebesar Rp. 623.

- 3 Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus sebesar 0,374 menyatakan bahwa setiap ada kenaikan retribusi sebesar Rp. 1.000 maka akan meningkatkan pengalokasian Belanja Modal sebesar Rp. 374.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pajak daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, dengan demikian H1 diterima, sehingga hipotesis pengaruh pajak daerah terhadap alokasi belanja modal diterima, ini berarti jika pajak daerah meningkat maka akan meningkatkan pengalokasian terhadap Belanja Modal.

Pajak daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah yang menggambarkan kemandirian dari suatu daerah dan mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal, ini berarti di Jawa Timur dari tahun 2014-2016 mengalokasikan pajaknya untuk belanja modal.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramlan (2016) yang menyimpulkan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap belanja modal, tetapi ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggun Hassan (2016) yang menyatakan secara parsial variabel pajak daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal karena pendapatan dari pajak yang kurang sehingga mengandalkakan dana perimbangan untuk membiayai belanja modalnya.

### **Pengaruh Rertibusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Dengan demikian H2 ditolak, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal adalah ditolak atau retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, Hal ini terjadi karena adanya anggapan yang menekankan dan memperjelas bahwa masyarakat memandang retribusi sebagai bagian dari program bukan sebagai pendapatan daerah dan bersedia membayar hanya bila tingkat layanan dirawat dan ditingkatkan.

Dalam penelitian ini memperjelas bahwa belum sepenuhnya belanja daerah di kabupaten/kota diprovinsi Jawa Timur digunakan sebagai pemenuhan kesejahteraan publik atau masyarakat, sebab pengelolaan belanja daerah terutama kenaikan penerimaan retribusi daerah tidak menyebabkan terjadinya peningkatan pada alokasi belanja modal. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria Valencia (2015) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, tetapi ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggun Hassan (2016) yang menyimpulkan, secara parsial retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi

belanja modal, dengan demikian H3 diterima, sehingga hipotesis pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap pengalokasian belanja modal diterima, yang berarti jika dana alokasi khusus suatu daerah meningkat maka akan meningkatkan belanja modal.

Menurut (Nordiawan dan Ayunigtiayas, 2010:26) DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramlan (2016) menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel dana alokasi khusus terhadap Belanja Modal, tetapi ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siska Puspita (2015) menyatakan bahwa dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal, karena kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak daerah, Retribusi daerah dan Dana alokasi khusus (DAK) terhadap alokasi

belanja modal. Sampel penelitian adalah 36 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2016. Berdasarkan hasil regresi linier berganda dan pembahasan yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal ini berarti, jika pendapatan pajak daerah meningkat maka akan meningkatkan pengalokasian terhadap belanja modal.
2. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Dari segi pendapatan retribusi mampu memberikan efek dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan untuk mempengaruhi belanja modal hanya mampu memberikan pengaruh yang kecil dan masih belum mampu memberikan kontribusi terhadap alokasi belanja modal. Dengan terjadinya hal tersebut membuat pengaruh retribusi daerah terhadap alokasi belanja modal masih belum maksimal terhadap pembangunan sektor ekonomi.
3. Dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal ini berarti, jika penerimaan dana alokasi khusus (DAK) meningkat maka akan meningkatkan pengalokasian terhadap belanja modal

#### **Keterbatasan**

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yang mungkin dapat



menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian. Keterbatasan – keterbatasan tersebut antara lain :

1. Sampel dalam penelitian ini dibatasi pada kabupaten/kota tertentu yang memiliki ketersediaan data, yaitu kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa Timur, sehingga hasilnya belum dapat di generalisasi untuk seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
2. Dalam penelitian ini masih terdapat kabupaten atau kota tidak melaporkan data laporan pendapatannya.
3. Informasi yang peneliti dapatkan kurang mendetail atau bisa dikatakan kurang transparan, karena sewajarnya informasi mengenai penerimaan dan kegunaan APBD dapat dipublikasikan supaya masyarakat dapat mengetahui alokasi APBD di daerahnya.
4. Faktor-faktor penentu belanja modal yang hanya sebatas bersumber pada pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang dilihat atau diambil dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, sehingga diperlukan adanya tambahan variabel yang terkait lainnya.

#### **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberikan saran-saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

- a. Pemerintah daerah kabupaten dan kota wilayah Jawa Timur, khususnya Dinas Pendapatan

Daerah meningkatkan pengawasan atas alokasi biaya yang dikeluarkan disetiap daerah agar penggunaanya efektif, efisien dan ekonomis. Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

- b. Penambahan variabel independen yang dapat mempengaruhi belanja modal, misalnya jenis-jenis atau ukuran penerimaan pemerintah daerah lainnya maupun variabel non keuangan, seperti jumlah penduduk. Daerah dengan jumlah penduduk yang lebih banyak tentu membutuhkan belanja modal lebih banyak yang digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan publik dari pada daerah dengan jumlah penduduk sedikit.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan, dan penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang dan menambahkan variabel independen yang lain untuk memperoleh hasil yang lebih relevan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggun, Hassan. 2016. "Pengaruh Dana Alokasi Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Di Kota Manado Tahun 2005-2015)". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol 16 No 03. Pp. 348-355.
- A.A. Ngurah, A. K. 2013. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Pengangguran Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 5.3. Pp. 544-560.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur (<http://www.bps.go.id>. Diakses 30/03/2017)
- Dian Novita, S. 2015. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal". *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. Vol. 11. Pp. 127 – 134.
- Diana, Sari. 2013. "Konsep Dasar Perpajakan". Bandung : PT Refika Aditama.
- Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Belanja Modal dan Pengeluaran Investasi Pemerintah. Artikel online melalui(<http://www.anggaran.depkeu.go.id>. Diakses pada 22/09/2016).
- Eisenhardt, K.M. 1989. "Agency Theory: An Assessment and Review". *Academy of Management Review*, Vol. 14 (1). Pp. 57-74.
- Erlina dan Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan: Brama Ardian.
- Gugus Wandira. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal". *Accounting Analysis Journal*. Vol 2 (1). Pp. 45-51.
- Halim, Abdul & Kusufi Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2012. "Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungannya Dengan Belanja Pemeliharaan Dan Sumber Pendapatan". *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 2 No. 2 (Oktober): Pp. 17-32.

- Harianto, David. 2007. "Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita". *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X Makasar*. Pp. 16 - 22.
- Hasbiullah, 2015. *Ekonomi publik suatu perbandingan konsep ekonomi islam dengan teori konvensional*. Makassar. Alauddin University Press.
- Imam, Ghozali, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Imam, Ghozali, 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure . *Journal of Financial Economics, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360. Available from: <http://papers.ssrn.com>*
- Kawedar, Warsito, A. Rohman dan S. Handayani. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Buku I. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kevin Lane Keller. 2003. *Strategic Brand Manajemen*. Second Edition. Prentice Hall.
- Koransindo (Jawa Timur). 04-09-2016, hal 5.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Maria Valencia, W. 2015. "Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah, Dau, Dan Dak Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal". *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Vol 4 No 11. Pp. 02-17.
- Ni Luh Dina, S. M. 2014. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Periode 2006-2012". *E-Journal Bisma*. Vol 2. Pp. 01-10.
- Nordiawan, Deddi dan Ayunigtiayas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta. Salemba Empat.
- Ramlan. 2016. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal". *Jurnal Magister Akuntansi*. Vol 5, No 2. Pp. 79- 88.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 09 tahun*

- 2015                      *Tentang Pemerintahan Daerah.*
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia No 09 Tahun 2015 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.*
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.*
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang No. 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Siska Puspita, D. 2015. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Akuntansi*. Vol.3 No 1. Pp 09-21.
- Sri Putri Handayani HS. 2015, "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh". *Jurnal Magister Akuntansi*. Vol 4 No 2. Pp. 45- 50.
- Sugiyono. 2013. "*Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*". Bandung: AFABETA.
- Virgini Gabriela Runtu. 2016. "Pengaruh Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Modal Kota Manado Periode 2005-2015". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol 16 No. 03. Pp 747-757.